

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

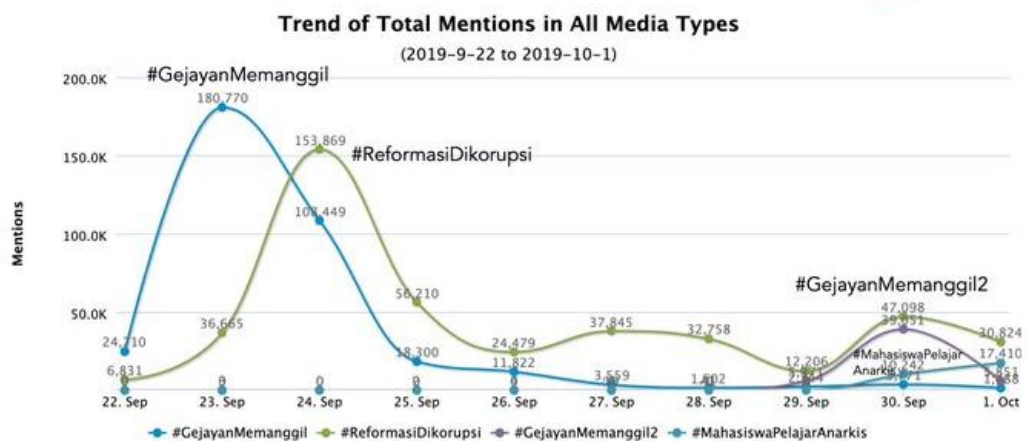
Demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam kendali rakyat, dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau melalui beberapa wakil yang dipilih oleh rakyat berdasarkan sistem pemilihan yang bebas, adil, dan jujur (Taufik, 2021). Indonesia menggunakan bentuk pemerintahan yang dijalankan dengan menganut sistem demokrasi, hal tersebut diatur dalam Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan sedikit penjelasan mengenai demokrasi sebelumnya, dapat dilihat jika masyarakat berkontribusi dalam keputusan politik yang ada baik itu secara signifikan atau tidak. Kehidupan suatu warga negara tidak akan jauh dari yang namanya politik. Politik memiliki keterkaitan dengan kedalaman hidup manusia, karena di dalamnya dikelola kebudayaan, pendidikan, kesejahteraan, tata religius, dunia ruang lingkup kehidupan, komunikasi interpersonal, hukum sistem peradilan, sejarah, retorika, aneka nilai kebersamaan, dan rupa-rupa kepentingan peristiwa hidup keseharian (Riyanto, 2011).

Partisipasi politik adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan keikutsertaan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (Fathurokhman, 2022). Setiap individu memiliki hak untuk memantau, berpartisipasi, menyuarakan, mengkritisi kondisi politik yang terjadi, terlebih lagi keadaan politik seringkali menimbulkan dinamika tidak terduga dan dapat berpengaruh terhadap arah kebijakan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap isu sosial, ekonomi, dan sebagainya. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah demonstrasi, demonstrasi adalah salah satu bentuk dari demokrasi karena masyarakat sebagai warga negara menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengekspresikan aspirasinya di muka umum. Demonstrasi merupakan alternatif komunikasi yang paling mungkin bagi masyarakat jika komunikasi mengenai

kebijakan hanya bersifat satu arah dari atas ke bawah, dan menyimpang dari kepentingan masyarakat (Ibrahim, 2024). Isu demonstrasi seperti ini salah satu penyebabnya terjadi karena adanya gejolak dalam kepercayaan politik. Kepercayaan politik menjadi suatu perwujudan dari harapan bahwa pemerintah sebagai yang mengatur negara akan merespons aspirasi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memperlihatkan ketidakpuasan apabila harapan tersebut tidak sesuai dengan realitas (Munawarah et al., 2022). Demonstrasi yang dipicu karena tidak terwujudnya harapan juga ada dalam berbagai bentuk seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi, kebijakan pemerintah yang dapat merugikan, tidak adil, melanggar hak dasar, penyimpangan dalam sistem pemerintahan, aspirasi tidak tersalurkan, pemicu khusus dan akumulasi kemarahan (Saragih, 2025).

TREN TAGAR

DroneEmprit



Gambar 1. 1 Screenshot Data Tren Tagar September 2019

Sumber: Analisis Drone Emprit (Fahmi, 2019)

Seiring berkembangnya zaman termasuk perkembangan digitalisasi dan media sosial dapat membantu para mahasiswa, organisasi, aktivis, buruh, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya yang ingin melakukan demonstrasi lebih mudah baik itu mobilisasi informasi, isu, hingga mobilisasi massa dalam ajakan aksi demonstrasi. Seperti pada gambar 1.1 terlihat pada tahun 2019 muncul aksi demonstrasi bernama #GejayanMemanggil yang membawakan tuntutan seperti revisi RKUHP, menolak pelemahan KPK, pengesahan RUU-PKS, penanganan kerusakan lingkungan, menolak pasal bermasalah dalam RUU ketenagakerjaan dan pertahanan langsung (Wahyuningtyas, 2025). Gerakan tersebut mengajak semua

orang turut bersuara terhadap beragam isu nasional seperti zaman perjuangan reformasi dulu. Gerakan Gejayan Memanggil pada tahun 2019 diprakarsai oleh mahasiswa -mahasiswa di Yogyakarta untuk menyerukan aksi damai yang menjadi *trending topic* di media sosial. Tagar #GejayanMemanggil bahkan sempat menyentuh 180 ribu lebih penggunaan di media sosial, dan dari inisiasi tagar tersebut menimbulkan kesadaran bersama untuk mengawal isu dan gerakan yang diinisiasi melalui tagar tersebut. Melalui gerakan tersebut menjadi salah satu contoh bahwa media sosial dapat menjadi kanal mobilisasi massa, isu, pemikiran kolektif. Menurut Chon dan Park (2020) menyebutkan aktivisme digital sebagai fenomena sosial di mana terdapat perdebatan isu, mobilisasi tindakan dan solidaritas atas identitas bersama, dan memanfaatkan komunikasi sebagai sarana penyelesaian konflik (Aritonang, 2023).

Pergeseran metode dalam mobilisasi massa, informasi, pemikiran dan solidaritas kolektif yang sebelumnya konvensional hingga kini berubah menggunakan media sosial yang menimbulkan aktivisme digital tentu memiliki peran yang dijalankan oleh suatu golongan atau kelompok tertentu yang salah satunya adalah Generasi Z. Berdasarkan salah satu jurnal berjudul “Resepsi Generasi Z terhadap Efektivitas Aktivisme Digital sebagai Bentuk Partisipasi Sosial” mengatakan jika Generasi Z memiliki resepsi terhadap aktivisme digital sebagai cara efektif dalam menyuarakan aspirasi sosial serta argumentasi politik mereka (Fazrina et al., 2025). Banyak dari mereka merasa memiliki wewenang dalam pembentukan narasi sosial sehingga bukan hanya sebagai pemberi opini namun juga sebagai penggerak. Meski begitu pada penelitian tersebut juga mengatakan sebagian Generasi Z melihat aktivisme digital sebagai identitas sosial belaka di dunia maya tanpa komitmen jangka panjang.



Gambar 1.2 Aksi Demonstrasi di Depan Gedung DPR, 25 Agustus 2025

Sumber: (Mardianti, 2025)

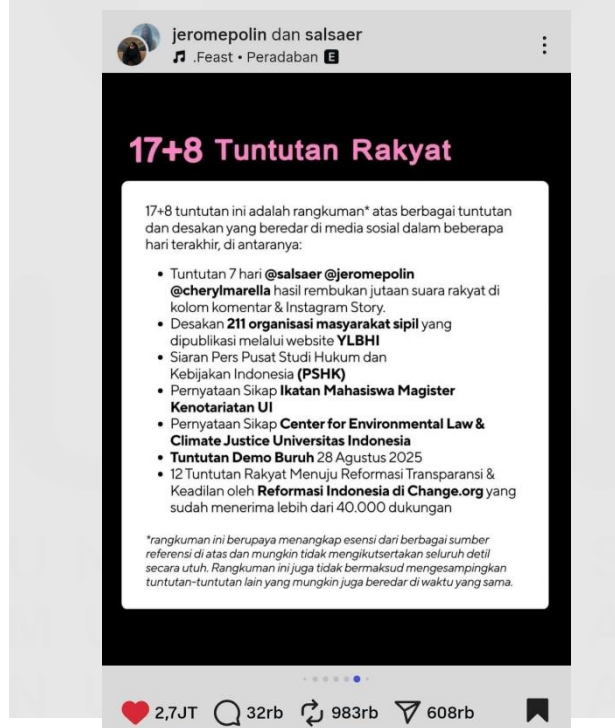
Selain aksi Gejayan Memanggil pada tahun 2019, terjadi lagi aksi yang menggabungkan fungsi media sosial dengan demonstrasi. Pada akhir bulan Agustus 2025 terjadi keramaian di media sosial yang membahas tentang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Demonstrasi tersebut terjadi di pekan keempat di bulan Agustus 2025 dan berlangsung selama beberapa hari dan diikuti dari beragam lapisan masyarakat termasuk mahasiswa. Demonstrasi tersebut terjadi secara bertahap dalam beberapa hari dengan tujuan yang melebar. Mengutip dari salah satu sumber berita di internet, pada hari Senin 25 Agustus seruan demo muncul dari grup *Whatsapp* dan juga media sosial dari kelompok yang menakutkan dirinya “Revolusi Rakyat Indonesia” yang telah disebar seminggu sebelum pelaksanaan. Dalam narasinya kelompok tersebut menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan presiden yaitu Joko Widodo hingga pemakzulan Gibran Rakabuming Raka serta seruan untuk membubarkan DPR dengan mendesak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kontrol pemerintah. Lalu pada hari Kamis 28 Agustus serikat buruh melakukan demonstrasi dengan tujuan berbeda. Mereka membawa 6 tuntutan kepada DPR mulai dari penghapusan *outsourcing*, penolakan upah murah, stop PHK, percepat pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, revisi UU Pemilu. Lalu pada siang harinya datang mahasiswa menuntut mencabut tunjangan anggota dewan yang nominalnya sampai 100 juta rupiah tiap bulan. Pada malam Kamis tersebut terjadi musibah ojek *online* bernama

Affan Kurniawan tewas terlindas mobil Brimob yang menyulut kemarahan massa dan mengepung Mako Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang. Demonstrasi menjadi rucuh dan banyak tindakan vandalisme seperti merusak fasilitas umum hingga hari Sabtu tanggal 30 Agustus (Mardianti, 2025).

Dari semua kejadian tersebut menimbulkan pemberitaan dari beragam media, bahkan Indonesia menjadi sorotan oleh beberapa media berita di luar negeri. Beragam media pemberitaan menyorot aksi demonstrasi mulai dari media asing BBC yang membahas kematian Affan Kurniawan yang membuat bentrok dengan polisi di berbagai kota. Lalu media Al Jazeera yang membahas kematian Affan Kurniawan, kebijakan ekonomi dan politik yang tidak berpihak, hingga membahas dalam liputannya bahwa langkah Prabowo dalam menangani ragam kasus terkait demonstrasi ini akan menjadi penentu terhadap pemerintahannya apakah akan terjaga pada jalur demokrasi atau berpotensi berubah ke arah otoriter. Ada juga media artikel berita The Diplomat yang menyebut aksi demonstrasi yang terjadi adalah bentuk ketidakpuasan terhadap ekonomi dan politik Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo (Mahadewi, 2025).

Selain dari beragam media berita, aksi demonstrasi tersebut juga menjadi sorotan di media sosial dengan narasinya dari berbagai akun yang melakukan *framing* terhadap kelompok atau pihak tertentu. *Framing* didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih fokus pada pesan tersebut (Siregar & Qurniawati, 2022). Kehadiran media sosial dengan kemampuan untuk berbagi secara cepat dan luas, memungkinkan konten yang diunggah oleh suatu individu dapat dengan mudah menyebar ke ribuan pengguna lainnya (Ghifari, 2023). Setiap pengguna media sosial memiliki pemikiran, sikap, hingga kepentingan yang beragam ketika menggunakan media sosial baik itu dalam menerima atau menyebarkan informasi. Sifat media sosial yang instan membuat arus informasi sulit dikendalikan dan menjadi rawan jika banyak oknum yang membawa narasi menyimpang terlebih lagi di tengah krisis seperti demonstrasi. Saat ini juga oknum *buzzer* beberapa kali terlibat dalam penyebaran atau pembentukan informasi sehingga informasi tersebut dapat dijadikan *framing* di media sosial. Pada dasarnya *buzzer* media sosial merupakan

akun media sosial yang menyebarkan, mengkampanyekan, mendengungkan suatu pesan dan konten dengan tujuan memperkuat pesan dan konten sehingga menjadi opini publik (Arianto, 2020). Namun seringkali *buzzer* media sosial ini ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah keadaan sehingga informasi juga jadi tidak jelas mana yang benar dan salah karena adanya beragam narasi dan *framing*. Sehingga untuk menghindari fokus yang terpecah belah terlebih lagi terkait beragam topik yang dibahas dalam demonstrasi, maka dibentuklah unggahan berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat” yang dibentuk oleh 20 kontributor seperti Jerome Polin, Salsa Erwina, Cheryl Marella, Firdza Radiany, dan sebagainya yang juga menampung beragam aspirasi publik termasuk yang tersebar di media sosial (Sani, 2025). Dengan adanya unggahan ini dapat memberikan visi yang sama dan solidaritas terkait demonstrasi agar tidak terpengaruh/terprovokasi oleh narasi yang memecah belah.



Gambar 1. 3 Screenshot Pihak Pembuat 17+8 Tuntutan Rakyat

Sumber: Akun Instagram @jeromepolin @Salsaer (2025)

Unggahan berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat “ berisikan aspirasi dari demonstrasi yang mewakili keseluruhan rakyat Indonesia. Makna dari angka 17+8 adalah

representasi dari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 bulan 8 (Milagsita, 2025). 17+8 Tuntutan Rakyat berisi tuntutan 7 hari dari akun *influencer* @salsaer, @jeromepolin, @cherylmarella serta hasil rembukan jutaan suara rakyat di kolom komentar dan *Instagram story*. Selain itu ada dari desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasi melalui *website* YLBHI, siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap center for environmental law & climate justice Universitas Indonesia, pernyataan sikap ikatan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025, 12 tuntutan rakyat menuju reformasi transparansi & keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang telah menerima lebih dari 40.000 dukungan.



Gambar 1.4 Screenshot Isi Tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat

Sumber: Akun Instagram @jeromepolin @Salsaer (2025)

Isi dari unggahan “17+8 Tuntutan Rakyat” terdiri dari 17 tuntutan dengan batas waktu jangka pendek yaitu 5 September, dan 8 tuntutan untuk jangka panjang dengan batas waktu 31 Agustus 2026. Inti dari 17 tuntutannya adalah Tarik TNI dalam ranah pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran, Bentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus Affan Kurniawan dan korban kekerasan lainnya, bekukan kenaikan gaji dan batalkan fasilitas baru DPR, transparansi anggaran DPR, desak Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah, memberikan sanksi pemecatan atau sanksi tegas kader DPR yang tidak etis, umumkan komitmen partai berpihak kepada rakyat, libatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa serta rakyat sipil, pembebasan demonstran yang ditahan, hentikan perlakuan kekerasan polisi dan ikuti SOP, transparansi proses hukum anggota dan komandan yang melakukan serta menginstruksikan kekerasan dan melanggar HAM, TNI kembali ke barak, tegakkan disiplin internal supaya anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi, upah yang layak bagi seluruh angkatan kerja, lindungi buruh kontrak dan ambil langkah darurat pencegahan PHK massal, buka dialog dengan buruh terkait upah minimum dan outsourcing. Sedangkan isi dari 8 tuntutan dengan jangka waktu panjang mulai dari reformasi DPR besar-besaran serta reformasi partai politik dan perkuat pengawasan eksekutif, susun rencana reformasi perpajakan supaya lebih adil, pengesahan UU perampasan aset koruptor, reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar humanis dan profesional, TNI kembali ke barak, perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, tinjau ulang kebijakan pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan (Milagsita, 2025).

Jerome Polin dan Salsa Erwina membagikan unggahan konten “17+8 Tuntutan Rakyat” melalui fitur *collab post* di Instagram. Gerakan atau konten tersebut dibentuk bukan hanya oleh mereka berdua tapi juga bersama beberapa pihak lainnya seperti yang telah disebutkan. Jerome dengan awal mula karirnya pada tahun 2015 adalah menjadi konten kreator edukatif, lalu pada tahun 2021 mencoba bisnis (Maylindra, 2025). Salsa Erwina yang biasa membahas isu sosial, manajemen diri, edukasi dengan akademis bagus bahkan tercatat sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Gadjah Mada (UGM), (Yahya, 2025). Mereka yang menjadi *influencer*

dengan latar belakang tersebut membuat mereka sebagai komunikator yang membawakan gerakan 17+8 memiliki nilai lebih dari segi jangkauan audiens terlebih lagi pengikut mereka di Instagram juga ada jutaan orang. Media sosial kini telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari, di mana *influencer* memainkan peran penting dalam membentuk tren budaya dan gaya hidup (Nurhayati et al., 2025). Definisi dari *influencer* media sosial adalah individu yang aktif menggunakan akun media sosialnya dan sering terlibat memberikan informasi terbaru maupun topik tertentu supaya dapat merubah sikap individu sesuai kehendaknya (Hermenda et al., 2019). Setiap *influencer* memiliki *engagement*, cakupan, efek yang beragam salah satunya adalah berdasarkan pengikut yang mereka miliki. Terdapat beberapa kategori *influencer* berdasarkan jumlah pengikutnya di media sosial, mulai dari tingkat terbawah adalah *nano influencer*, *micro influencer*, *mid-tier influencer*, *macro influencer*, *mega influencer* (Redcomm, 2025). Jerome Polin sendiri termasuk dalam *mega influencer* karena memiliki basis pengikut khususnya di Instagram sebesar 9 juta pengikut, dengan kategori yang sama Salsa Erwina memiliki 2 juta pengikut di Instagram.

Peran *influencer* dalam mempengaruhi opini publik di media sosial juga dipengaruhi oleh faktor kredibilitas *influencer* tersebut di mata publik. Terdapat beberapa komponen yang membentuk kredibilitas *influencer* mulai dari *expertise*, *trustworthiness*, *attractiveness*, *authenticity* (Hakim et al., 2025). Dengan kredibilitas yang dimiliki oleh Jerome Polin serta basis pengikutnya di Instagram juga banyak, membuat unggahan “17+8 Tuntutan rakyat” memiliki *engagement* unggahan yang tinggi seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya di mana jumlah *like* didapatkan hingga 2,7 juta. Dengan kelebihan yang dimiliki Jerome Poline dan Salsa Erwina di media sosial, mereka menempatkan dirinya sebagai komunikator politik dengan menyampaikan pesan terkait isu-isu yang terjadi lalu didiskusikan dengan beragam pihak dan disebarluaskan melalui akun Instagramnya, selain itu dapat dilihat jika yang menjadi komunikator politik bukan hanya yang berasal dari anggota aktif politik namun juga bisa dari yang lainnya. Adanya unggahan tersebut yang disebarluaskan di media sosial memungkinkan banyak orang berpartisipasi dalam

diskusi politik, menggerakkan suatu kelompok, bahkan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pesan yang disebarkan melalui unggahan “17+8 tuntutan rakyat” memiliki *engagement* yang besar, tentunya karena adanya beberapa faktor dari pihak komunikator yaitu Jerome Polin dan Salsa Erwina yang membuat pesan tersebut dapat sampai ke banyak audiens, salah satunya adalah unsur efektivitas. Efektivitas pesan dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yang ada pada komunikator sehingga dapat mempengaruhi audiens melalui proses yang berbeda, terdapat tiga karakteristik komunikator yaitu *authority*, *credibility*, *social attractiveness* (Perloff, 2017). Hal lainnya tentu adalah pesan apa yang dibawa oleh mereka, jika gerakan seperti #GejayanMemanggil adalah gerakan sosial yang muncul sebagai seruan untuk demonstrasi, seruan yang muncul sebelum demonstrasi. Berbeda dengan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang merupakan gerakan yang muncul setelah terjadinya beberapa rangkaian demonstrasi pada Agustus 2025 di beberapa kota yang berawal dari masalah tunjangan fantastis DPR, respon anggota DPR yang buruk, termasuk respon Ahmad Sahroni yang menghina dengan cacian di depan umum pada 22 Agustus 2025 (Santoso, 2025). Pesan yang dibawa Jerome dan Salsa ini merupakan rangkuman atas peristiwa serta tuntutan yang memang sudah ada saat demonstrasi ataupun di media sosial seperti yang dijelaskan pada beberapa paragraf sebelumnya.

Beberapa pihak pembuat terutama Jerome dan Salsa mengemas pesan menjadi sebuah rangkuman dalam suatu unggahan dengan kemasan yang penuh filosofi. Seperti penamaan gerakan 17+8 yang bermakna hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus mewakili 17 tuntutan jangka pendek dan angka 8 yang berarti bulan ke-8 adalah Agustus yang mewakili tuntutan jangka panjang. Lalu pemilihan dan penamaan warna *brave pink hero green* terinspirasi dari Ibu Anna yang ikut demonstrasi dengan pakaian berwarna pink saat momen itu, dan warna hijau representasi simbol kebaikan dan warna ojek daring, yaitu dari almarhum Affan yang meninggal saat aksi pada akhir Agustus (Sani, 2025).

Ketika demonstrasi isu nasional umumnya akan ada mahasiswa yang turun ke jalan, pengertian umum dari mahasiswa bisa berupa bagian kelompok dalam

masyarakat yang memiliki ikatan status dengan perguruan tinggi sebagai pembelajar. Di Indonesia mahasiswa memang dikenal aktif terlibat dengan hal yang berkaitan dengan politik sejak zaman dulu seperti gerakan mahasiswa 1966. Dan yang paling diingat mungkin ketika tahun 1998 mahasiswa terlibat dalam gerakan reformasi hingga ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR. Suara mahasiswa dikenal vokal dan aksi demonstrasi di Indonesia sering dilakukan oleh mahasiswa. Hal itu karena mahasiswa dianggap memiliki beragam peran seperti *agent of change*, *social control*, *guardian of value*, *moral force*, *iron stock* (Muhammad, 2023). Suara mahasiswa dianggap lebih murni dan tulus karena mereka tidak terikat oleh kepentingan politik atau kekuasaan. Mahasiswa cenderung berani menyuarakan ketidakadilan karena umumnya sedang berada dalam fase hidup yang penuh energi, idealisme, dan ambisi. Gerakan mahasiswa di Indonesia juga sudah ada sejak zaman Soeharto dan sering jadi pembuka jalan dalam perubahan politik. Melalui demonstrasi, diskusi, advokasi, mahasiswa berusaha mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan nyata dalam memenuhi janji-janji politik yang telah dibuat (Salsa, 2024).

Dengan media sosial yang didominasi oleh anak muda yang di dalamnya terdapat mahasiswa yang masuk ke dalam golongan tersebut membuat media sosial juga dapat menjadi wadah untuk membangun kesadaran politik mahasiswa. Beragam informasi untuk meningkatkan kesadaran politik dapat diakses karena adanya penyebaran informasi yang cepat di media sosial baik itu dari media berita resmi, *influencer*, ataupun sesama pengguna. Dengan adanya *influencer* yang menjadi bagian dalam lingkup media sosial dapat menjadi nilai lebih dalam menggiring opini terutama pada mahasiswa terkait isu-isu politik, contohnya adalah adanya unggahan berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat” yang diunggah oleh Jerome polin dan beberapa *influencer* lainnya, tinggal bagaimana mahasiswa menyikapinya ketika mengetahui informasi tersebut.

Penelitian ini meneliti resepsi mahasiswa terhadap isu demonstrasi dari konten yang dibuat berasal dari *influencer* dan hal itulah yang menjadi gap penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa resepsi mahasiswa yang melihat konten “17+8 Tuntutan Rakyat” terhadap isu demonstrasi bagaimana mereka menyikapi

pesan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori resepsi oleh Stuart Hall sebagai teori utama untuk menganalisa resepsi mahasiswa. Analisa akan menerapkan metode *encoding-decoding* dari unggahan “17+8 Tuntutan Rakyat”. Teori ini menekankan proses *decoding* atau penerimaan pesan dan pemahaman sebagai inti dari analisis resepsi, dan membagi posisi resepsi menjadi *dominant hegemonic, negotiated, oppositional* (Hall, 2019). Untuk dapat pemahaman dari resepsi mahasiswa, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis resepsi Stuart Hall untuk memahami bagaimana mahasiswa memaknai pesan konten atau aktivisme digital dari 17+8 Tuntutan Rakyat.

1.2. Rumusan Masalah

Demonstrasi dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan aspirasi di muka umum untuk mengkomunikasikan kebijakan yang menyimpang dari rakyat dan sebagai bentuk penggunaan hak konstitusionalnya. Adanya media sosial membuat arus penyebaran informasi lebih cepat dan luas, siapapun bisa terlibat sehingga rawan juga dengan informasi yang tidak akurat atau justru membawa narasi propaganda. Kehadiran *influencer* di zaman sekarang dapat memainkan peran penting dalam membentuk tren budaya dan gaya hidup. Dengan hadirnya Jerome Polin yang memprakarsai konten “17+8 Tuntutan Rakyat” bersama dengan beberapa pihak lain, membuat pengguna media sosial khususnya masyarakat Indonesia jadi memiliki visi yang jelas dan sama terkait apa saja yang ingin disampaikan dalam demonstrasi.

Mahasiswa yang dianggap memiliki suara vokal, tidak terikat dengan kepentingan politik, sebagai *agent of change*, dapat menginterpretasikan bagaimana sikap mereka terhadap unggahan tersebut termasuk sikap partisipasi politiknya. Beberapa penelitian pernah membahas teori resepsi Stuart Hall dan ada juga yang temanya berhubungan dengan politik, namun yang membahas resepsi mahasiswa terhadap konten politik mengenai demonstrasi yang dibuat dan disebarkan oleh *influencer* belum ada. Maka dari itu, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana resepsi mahasiswa terhadap aktivisme digital “17+8 Tuntutan Rakyat” oleh *influencer* pada Insatgram Jerome Polin dan Salsa Erwina.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, pertanyaan penelitian yang timbul adalah bagaimana resepsi mahasiswa terhadap aktivisme digital “17+8 Tuntutan Rakyat” oleh *influencer* pada Insatgram Jerome Polin dan Salsa Erwina?.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah mengetahui resepsi mahasiswa terhadap aktivisme digital “17+8 Tuntutan Rakyat” oleh *influencer* pada Instagram Jerome Polin dan Salsa Erwina.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bidang ilmu komunikasi terkait bagaimana pemahaman mahasiswa menerima dan memaknai narasi politik yang disebarkan oleh *influencer*. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya dalam mengembangkan topik, jenis, metode penelitian serupa, dan dapat menjadi referensi pendukung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada konten kreator termasuk *influencer* dengan melihat bagaimana mahasiswa menginterpretasikan pesan dan menyikapi suatu konten yang diterimanya di media sosial terutama dari *influencer*.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada aktivis sosial atau kelompok tertentu tentang bagaimana memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dari demonstrasi sehingga memiliki visi yang sama.

1.6. Batasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah objek penelitiannya hanya berfokus pada unggahan “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan subjek penelitiannya adalah mahasiswa S1 yang menjadi pengikut Jerome Polin dan Salsa Erwina di Instagram. Dari fenomena yang diteliti juga terbatas hanya pada resepsi mahasiswa memahami unggahan “17+8 Tuntutan Rakyat”.